

MENGELOLA KEBHINNEKAAN UNTUK KEMAJUAN DAN KESEJAHTERAAN BANGSA

PIDATO

Disampaikan Pada Sidang Universitas
dalam Rangka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa
Bidang Sosiologi Politik



OLEH :

A. Muhaimin Iskandar

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA, 3 OKTOBER 2017

MENGELOLA KEBHINNEKAAN UNTUK KEMAJUAN DAN KESEJAHTERAAN BANGSA

PIDATO

Disampaikan Pada Sidang Universitas
dalam Rangka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa
Bidang Sosiologi Politik



OLEH :

A. Muhaimin Iskandar

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA, 3 OKTOBER 2017



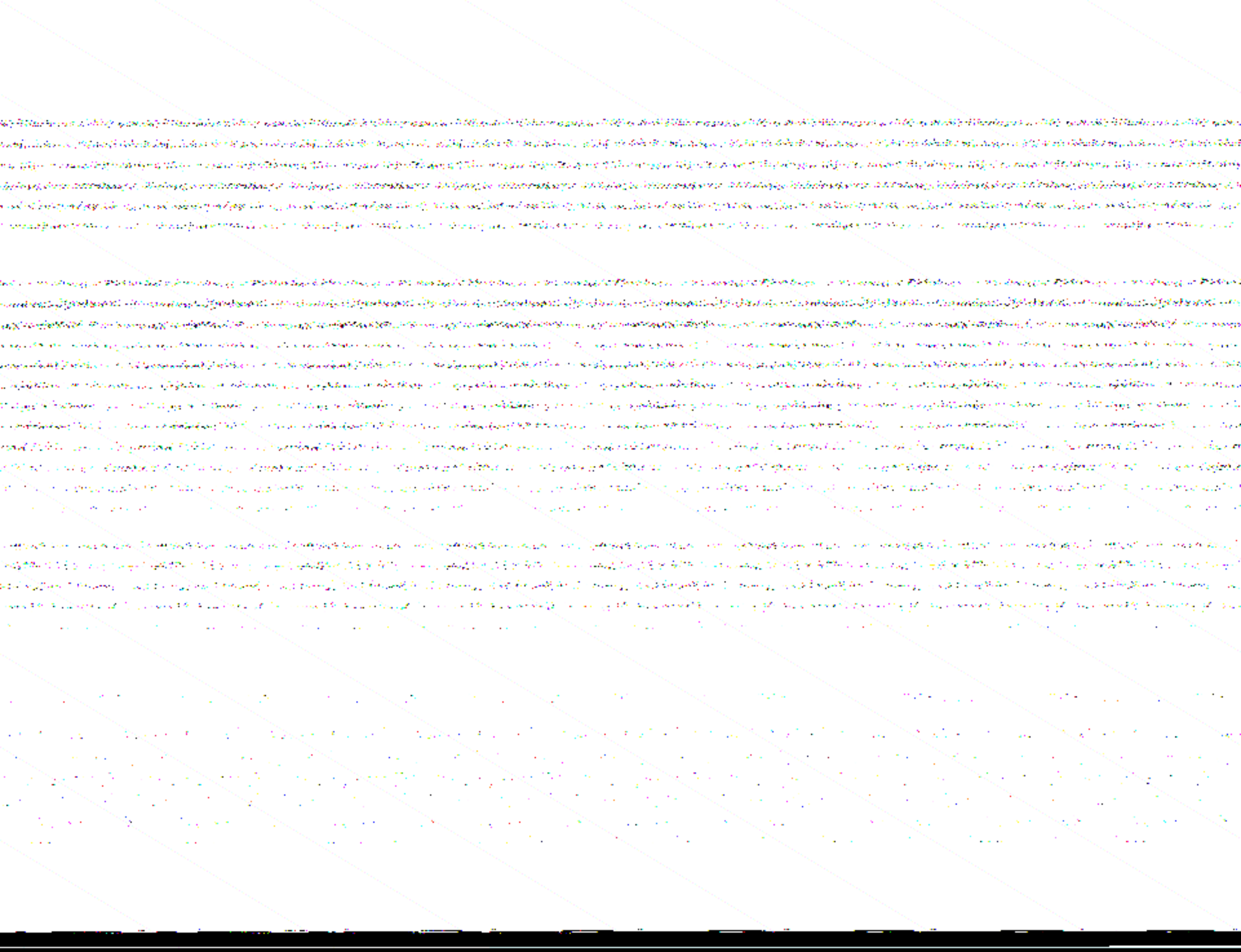
Assalâmu'alaikum Warahmatullâhi Wabarakâtu
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan bertemu di tempat ini dalam rangka penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa. Salawat serta Salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pembimbing dan pembawa lentera kehidupan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan pidato dengan judul: "Mengelola Kebhinnekaan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Bangsa."

Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin yang mulia,

Pada 17 Agustus 2017 yang lalu, kita baru saja merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-72 (tujuh puluh dua). Untuk pertama kali dalam upacara kemerdekaan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggunakan pakaian adat daerah, begitu juga ketika menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017. Secara simbolis, Kepala Negara hendak menyampaikan pesan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, ras, dan agama. Terdapat sekitar 17 ribu pulau, wilayah Indonesia teruntai bak *ratna mutu manikam*, dihuni oleh 300 etnis dan 1.340 suku bangsa dengan 1.211 dialek bahasa dan adat istiadat daerah (BPS, 2011). Persatuan dan kesatuan negara ini dirajut oleh Pancasila dan dijunjung dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Anugerah kemajemukan ini ditambah dengan potensi alamnya yang luar biasa. Daratannya dipenuhi dengan hutan-hutan penopang paru-paru dunia, dan di bawahnya terkandung kekayaan mineral yang banyak. Lautannya tidak hanya mengandung potensi ekonomi biru tiada tara, di bawahnya tersimpan bukan hanya ikan, tetapi juga mengandung cadangan migas dan mineral yang berlimpah. Indonesia terletak di posisi geopolitik strategis karena diapit dua samudera

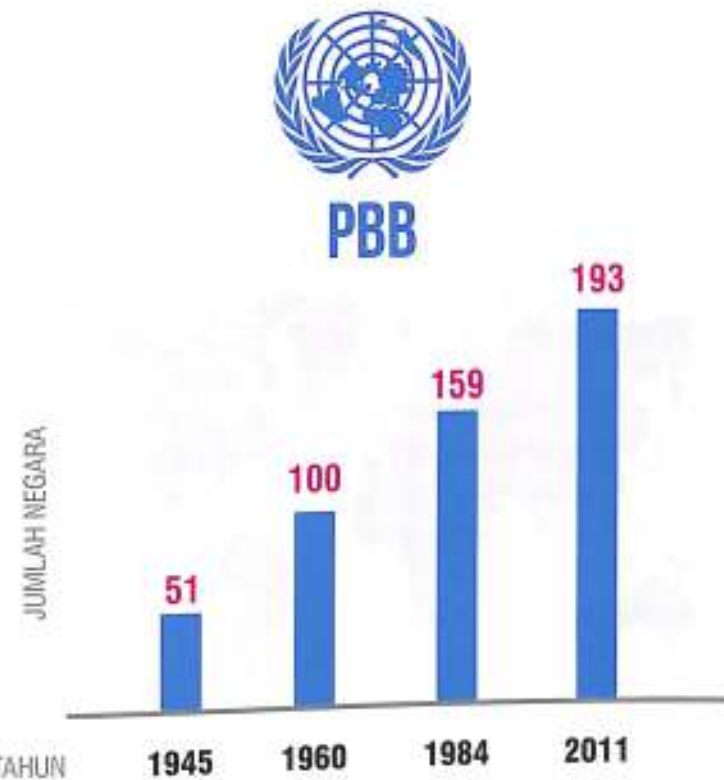




(1990: 6-7), lebih dari 90 persen negara modern tidak terbentuk dari kebangsaan tunggal (*nation-state*). Terkadang *nation* lebih besar ketimbang *state* (*multistate nationalities*), tetapi kebanyakan *state* lebih besar daripada *nation* (*multinational state*). Orang-orang Quebec yang diklaim sebagai “orang Perancis” yang ada di Kanada, orang-orang Palestina yang tersebar di Israel, Lebanon, Jordania, dan Mesir, dan bangsa Kurdi yang tersebar di Iran, Irak, dan Turki adalah contoh bangsa yang tersebar di banyak negara (*multistate nationalities*). Contoh paling aktual adalah Rohingnya, adalah suku bangsa yang kehilangan induk negaranya dan terlunta-lunta sebagai pencari suaka di banyak negara. Ada juga varian bangsa yang terpecah ke dalam dua negara dan sama-sama menjadi mayoritas seperti Korea Utara dan Korea Selatan, Sudan dan Sudan Selatan.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin yang mulia,

Mayoritas *nation-state* modern adalah *multinational state* seperti Indonesia. Dalam negara-bangsa majemuk seperti ini, tantangan utamanya adalah membangun integrasi nasional berbasis kewargaan (*civic nationalism*) tanpa menindas keragaman ekspresi suku bangsa sebagai naungan budaya dan afiliasi kulturalnya. Prinsipnya adalah kesetaraan non-diskriminatif. Dominasi etnis dominan dan diskriminasi terhadap etnis lain rentan mengundang etnonasionalisme, yaitu gerakan suatu kelompok etnis yang mengupayakan *self-rule*, baik dengan cara kekerasan untuk menuntut negara nasional terpisah (*sovereign statehood*) maupun dalam bentuk terbatas *self-rule* seperti wewenang otonom dalam kebijakan pendidikan dan pemakaian bahasa, aturan hukum yang terpisah, perpajakan, dan kontrol atas kekuatan polisi lokal (Snyder, 2000: 203; Rex, 2004: 16-17). Konflik etnonasionalis telah melahirkan banyak negara baru. Dari tahun 1945 - 1973, 81 negara baru lahir dari klaim atas hak bangsa menentukan nasib sendiri (*the right of nation to self-determination*) (Holton, 1998: 105).



Setelah Perang Dingin, dunia menyaksikan pecahnya imperium-imperium besar ke dalam kepingan negara-negara kecil berdaulat.

Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada 1945, keanggotaan PBB mencakup 51 negara. Pada 1960, keanggotaannya meningkat menjadi 100 negara, dan pada 1984 ketika Brunei Darussalam bergabung, keanggotaannya telah mencapai 159 negara. Namibia dan Liechtenstein bergabung pada 1990. Dalam dua setengah tahun sejak awal 1991 hingga pertengahan 1993, bertambah 25 negara—termasuk Estonia, Latvia, Lithuania, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Jorjia dan Andorra. Pada musim semi tahun 1993, bekas republik Yugoslavia, Makedonia, diizinkan bergabung dengan syarat Yunani dan anggota baru tersebut menentukan nama bagi negara baru itu. Kini keanggotaan

PBB mencakup 193 negara. Tiga negara terakhir anggota PBB adalah Timor Leste, Montenegro, dan Sudan Selatan. Ketiganya merupakan hasil referendum. Timor Leste adalah bekas Provinsi Indonesia, resmi diterima sebagai anggota PBB pada September 2002. Montenegro, yang mendeklarasikan diri merdeka dari Serbia pada 3 Juni 2006, diterima sebagai anggota PBB pada 28 Juni 2006. Sudan Selatan menjadi negara merdeka pada 9 Juli 2011 setelah konflik bersaudara puluhan tahun dan hasil referendum menunjukkan sekitar 99% pemilih menginginkan pisah dari Republik Sudan.

Tidak seperti Yugoslavia yang pecah menjadi beberapa negara kecil yang dikenal dengan istilah Balkanisasi, Indonesia relatif berhasil mencegah disintegrasi dari serangkaian konflik etnis yang menderanya. Namun, sebagai negara majemuk, sentimen etnis di Indonesia tidak pernah “tidur” dan bisa bangun dan meledak begitu bertemu faktor lain, terutama ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesalahan Orde Baru adalah memaksakan proses integrasi nasional dari atas melalui ideologisasi Pancasila dan mobilisasi kekuatan militer yang represif. Kemajemukan diringkus di bawah slogan persatuan semu di bawah kendali kekuasaan yang memusat di Jawa. Ketika Orde Baru tumbang, nasib Indonesia memang tidak seburuk Yugoslavia yang pecah menjadi beberapa negara, tetapi Indonesia harus rela kehilangan Timor Timur melalui referendum yang dramatis. Nasionalisme Indonesia juga mengalami fase-fase genting ketika gerakan etnonasionalisme mendera Aceh, Papua, dan wilayah-wilayah pinggiran lainnya. Pekik merdeka berkumandang di beberapa tempat yang dinodai oleh darah dan kekerasan sepanjang Orde Baru berkuasa. Konflik etnis meletup di Sambas (Kalimantan Barat), Sampit (Kalimantan Tengah), Poso (Sulawesi Tengah), Ambon (Maluku Selatan), dan Ternate (Maluku Utara) melibatkan kelompok dengan sentimen etnis dan agama yang rentan provokasi. Kerusuhan etnis juga pernah terjadi di Tarakan, Kalimantan Timur, antara suku Bugis (pendatang) dan suku Tidung (penduduk asli Tarakan).

Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin yang mulia,

Nasionalisme sebagai proyek menciptakan rasa sebangsa dari komunitas yang beragam pada dasarnya tidak pernah selesai didefinisikan sekali untuk selamanya (*once and for all*). Pergolakan berbasis etnis mewakili sebagian besar kekecewaan bangsa (*nation*) terhadap negara (*state*) terkait ketimpangan distribusi kesejahteraan dan dominasi kebudayaan kelompok etnis oleh kelompok lainnya. Di berbagai negara poskolonial, peran negara penting sebagai lokomotif pembangunan untuk memajukan kesejahteraan. Namun, di tengah arus global neoliberalisme yang membunyikan lonceng kematian *nation-state* (Ohmae, 1990; 1996), negara semakin kehilangan peran dan fungsinya karena seluruh sendi-sendi kehidupan sosial telah dikuasai dan didikte oleh kekuatan pasar. Ekonomi, politik, hukum, seni, dan budaya telah dieksploitasi pasar untuk memuluskan kepentingannya. Bahkan agama yang sejatinya adalah wilayah sakral telah dimanipulasi untuk memperbesar surplus di industri kostum, fesyen, dan hiburan.

Globalisasi telah melabrak batas-batas wilayah (*borders*) dan merombak ruang pergaulan manusia sejagat menjadi bulatan bumi tanpa tapal batas (*borderless world*). Ia mengkhotbahkan runtuhnya sekat-sekat negara karena semakin melintas-batasnya transaksi ekonomi dan budaya manusia sejagat. Ditopang oleh teknologi yang memampatkan ruang dan waktu, pergerakan ekonomi dunia terhubung dalam suatu jaringan global yang beredar secepat tekanan *tuts* komputer dan *keypad* ponsel pintar. Semua negara, termasuk Indonesia, didorong untuk memindahkan pengelolaan dan pelayanan sektor-sektor publik kepada swasta melalui mekanisme pasar.

Dalam arus peminggiran peran negara, kekayaan sumber daya alam nasional di sektor pertambangan, kehutanan, pertanian, dan kelautan diserahkan kepada swasta dengan sejumlah kontrak dan konsesi yang tidak memberi nilai tambah untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Negeri ini dalam banyak hal

masih tergantung asing untuk memenuhi hajat hidup rakyatnya. Sebagai negara agraris, Indonesia justru menghabiskan devisa untuk membeli bahan pangan yang sebenarnya bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri. Pembangunan memang terjadi, tetapi yang berderap adalah **pembangunan di Indonesia, bukan pembangunan Indonesia**. Pembangunan di Indonesia adalah pembangunan oleh siapa saja di Indonesia. Pelaku dan penerima manfaat tidak penting asal kue ekonomi tumbuh membesar. Yang dikejar adalah pertumbuhan (*growth*), karena itu investor diundang untuk menggarap ladang-ladang ekonomi di berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, kelautan, dan lain-lain.

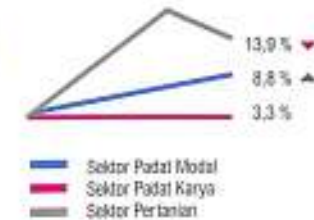
Pola pembangunan yang tidak inklusif ini menyisakan cacat yang ditunjukkan oleh ketimpangan antarwilayah, disparitas antarsektor ekonomi, dan kesenjangan (*polarisasi*) pendapatan antarpenduduk. Dari rilis BPS terakhir (Agustus 2017) terlihat bahwa pembangunan nasional masih terus memusat di Jawa dan Sumatera, yang menyumbang 80,34% PDB nasional. Pembangunan juga bukan ditopang oleh sektor penghasil barang yang padat karya (*tradable*), tetapi oleh sektor jasa dan keuangan yang padat modal (*nontradable*). Sektor *nontradable* tumbuh melesat hingga 8,8 persen, sementara sektor *tradable* terseok-seok di angka 3,3 persen. Pertanian, yang menampung 44 persen total tenaga kerja Indonesia (sekitar 39 juta), mengalami involusi dan menjadi sarang kemiskinan. Pada Agustus 2017, pertanian hanya tumbuh 3,33 persen dan kontribusinya terhadap PDB turun menjadi 13,9 persen. Jumlah keluarga petani susut menjadi 26 juta, dua pertiganya adalah petani gurem yang terpuruk karena penyusutan lahan, hancurnya infrastruktur pertanian, dan minimnya hubungan pertanian dengan kesejahteraan. Kue ekonomi memang tumbuh, tetapi tidak merata.

Kesenjangan juga tampak dari ketimpangan antarindividu dalam penguasaan kue ekonomi nasional. World Bank (2015: 18) melaporkan bahwa 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen kekayaan nasional, dan 10 persen orang terkaya

PDB NASIONAL



KONTRIBUSI PDB (2017)



KETIMPANGAN



DATA STATISTIK RESMI 2017



di Indonesia menguasai sekitar 77 persen kekayaan nasional. Indonesia adalah negara ranking ketiga tertimpang setelah Rusia dan Thailand. Indeks gini rasio mencapai 0,41, turun sedikit menjadi 0,39. Segelintir orang mendominasi kepemilikan atas jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan dan obligasi pemerintah, dan penguasaan tanah. Dari sekitar Rp 5.000 triliun uang simpanan di Bank, 55,7% di antaranya dikuasai oleh 0,1% pemilik rekening (239 ribu akun). Koefisien gini penguasaan tanah mencapai 0,6. Dari segi konsumsi, 20 persen orang terkaya di Indonesia mengambil 49% porsi konsumsi nasional pada 2014. Pada bagian lain, porsi konsumsi 40% lapis terbawah turun dari 21% pada 2004 menjadi 17% pada 2014.

Memperhatikan kondisi di atas, hingga diusia ke-72, negeri ini masih rentan menjadi lahan subur ekstremisme karena persoalan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, dan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa. Merujuk data statistik resmi 2017, masih ada sekitar 27,7 juta penduduk yang miskin, 7 juta orang menganggur, dan 3,6 juta rakyat yang buta huruf.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin yang mulia,

Di berbagai negara di dunia, nasionalisme ditentang karena gagal menyeimbangkan antara pembangunan politik dan pertumbuhan ekonomi serta gagal mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang parah. Gerakan Islam radikal yang muncul sejak dekade 1970-an mewakili sebuah keretakan kultural dengan ideologi sekuler modern yang dipandang bertanggung jawab atas seluruh penyakit masyarakat di Dunia Ketiga, mulai dari kesenjangan sosial sampai kezaliman, dari pengangguran endemis hingga korupsi yang merajalela. Banyak anggotanya sangat cakap, khususnya dalam sains, dan mereka bertujuan memisahkan teknologi yang paling maju, yang ingin mereka kuasai, dari nilai-nilai sekuler yang mereka tolak, demi memajukan etika yang menundukkan akal di hadapan Tuhan (Kepel, 1994: 8). Kegagalan nasionalisme sebagai

instrumen kesejahteraan dan keadilan telah menciptakan frustrasi yang menyeret sejumlah orang memilih ideologi kematian.

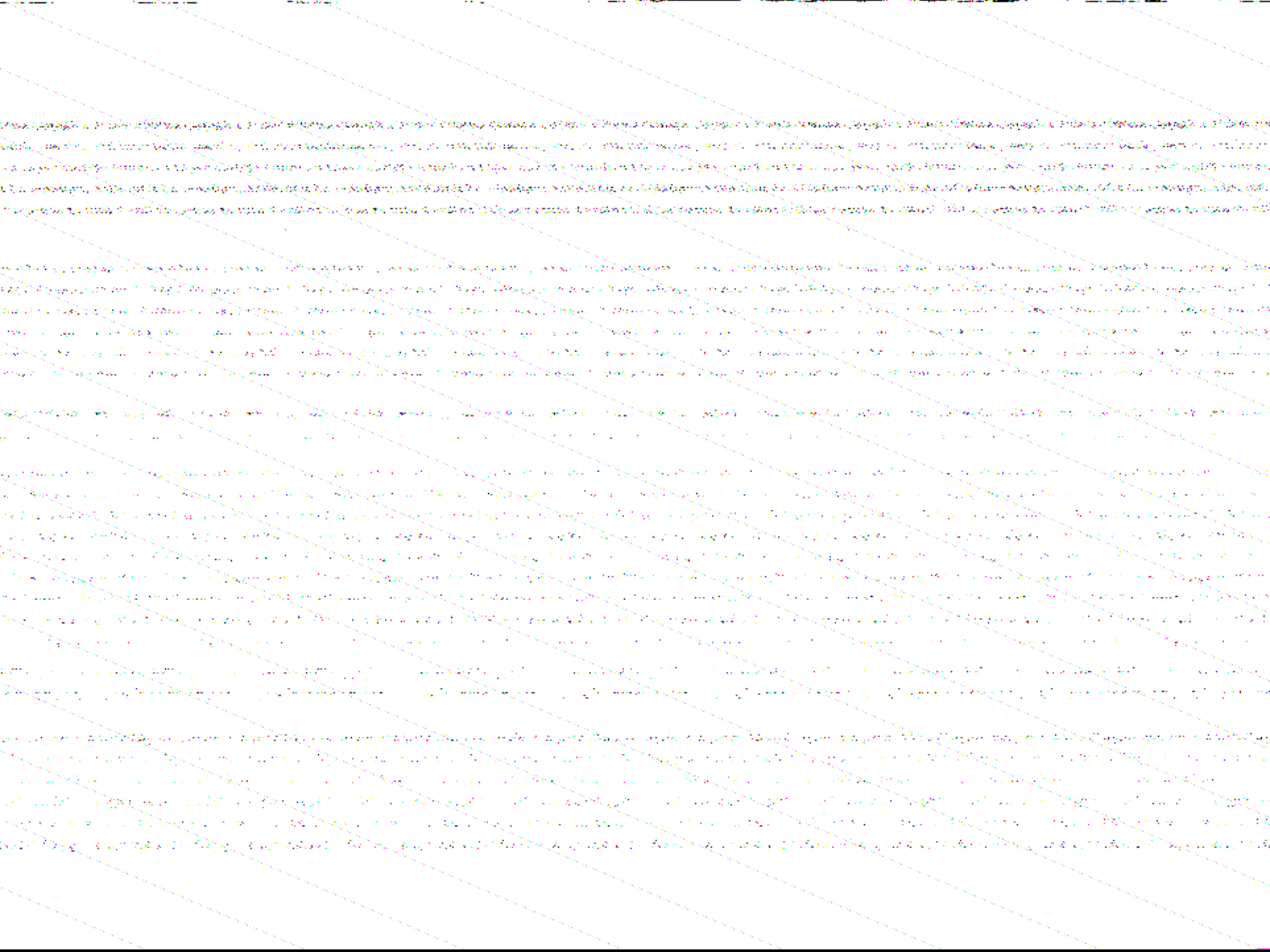
Dalam riset terbaru yang mencakup tiga kawasan (Timur Tengah, Eropa, dan Asia) dalam kurun 1950-an hingga sekarang mengenai banyaknya anak-anak muda terdidik bergabung ke kelompok-kelompok radikal, Gambetta dan Hertog (2016) mengungkap adanya faktor 'deprivasi relatif'. Deprivasi relatif terjadi ketika banyak kalangan merasa harapannya untuk meningkatkan kehidupan sosial tak terpenuhi. Dari sini mereka tertarik dengan gerakan-gerakan radikal karena mengira akan menemukan jalan keluar di sana. Deprivasi relatif banyak terjadi di negara-negara berpenduduk Muslim yang gagal memenuhi harapan kesejahteraan rakyatnya. Karena gagal menciptakan "pesta-pesta perkawinan" di dunia, banyak orang, termasuk mereka yang terdidik di perguruan tinggi, menjadi radikal. Sebagian tergoda menjadi pengantin surga, dengan melakukan bom bunuh diri, sebagai cara untuk menebus kekalahan diri. Mereka berupaya melarikan kekalahan di dalam sejarah menuju kemenangan di luar sejarah.

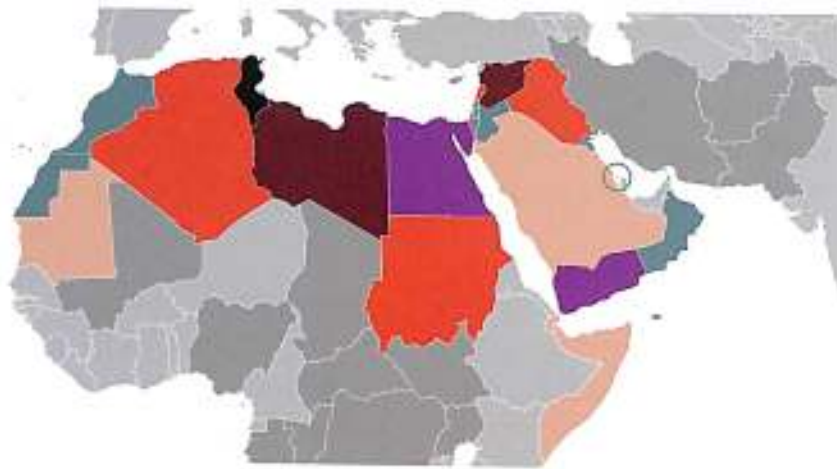
Ketegangan Islam dan nasionalisme juga bersumber dari perbedaan epistemologis yang lahir dari latar belakang historis. Nasionalisme lahir dari asumsi pemisahan agama dan negara dalam formasi



Deprivasi relatif terjadi ketika banyak kalangan merasa harapannya untuk meningkatkan kehidupan sosial tak terpenuhi. Dari sini mereka tertarik dengan gerakan-gerakan radikal karena mengira akan menemukan jalan keluar di sana.

Deprivasi relatif banyak terjadi di negara-negara berpenduduk Muslim yang gagal memenuhi harapan kesejahteraan rakyatnya.





Menguatnya gerakan nizam Islam di Timur Tengah dan Afrika telah menyumbang spiral kekerasan dan konflik berdarah sejak meletus Arab Spring (al-rabi' al-'Araby) pada 2010.

Islam sebagaimana tampak di Timur Tengah dan Afrika ternyata tidak cukup menjadi faktor pemersatu. Beberapa negara Afrika yang penduduknya hampir 100 persen Muslim justru dilanda konflik yang parah. Negeri-negeri Timur Tengah yang sedang diamuk perang juga mayoritas beragama Islam. Dalam kasus *Arab Spring*, ketiadaan konsensus ideologis berubah menjadi bara api begitu sekelompok orang berjuang menegakkan agenda Islam dalam corak yang keras, menuntut formalisasi syariat Islam, atau mendirikan negara Islam. Pergolakan politik yang ditimbulkan oleh gerakan fundamentalisme agama tidak sekadar menciptakan rintangan bagi perdamaian dunia, tetapi menyumbang secara aktif terjadinya kekacauan dunia yang sarat kekerasan. Menurut Tibi (1998: 113), gejala fundamentalisme agama adalah ekspresi ideologis dari "kembali anarki."

Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin yang mulia,

Islam dan nasionalisme pernah menjadi substansi yang paling serius diperdebatkan dalam rangka penetapan dasar negara menjelang Indonesia merdeka. Kendatipun Islam merupakan agama bagi

golongan terbesar penduduk Indonesia, para pendiri bangsa tidak merujuk kepada sumber-sumber ajaran dan sejarah Islam untuk wawasan mereka tentang negara-bangsa (Madjid, 2003: 84). Di tengah pertentangan antara kubu Islam dan netral agama, sebuah rumusan kompromi yang dikenal dengan "Piagam Jakarta 22 Juni 1945" menambahkan tujuh kata dalam dasar negara sehingga berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Yamin, 1959: 153-54).

Sehari setelah Proklamasi, atas keberatan dari penduduk Indonesia Timur dan demi menjaga keutuhan bangsa, para pendiri bangsa tidak keberatan menghapuskan 7 (tujuh) kata dalam Piagam Jakarta. Sebagai gantinya, atas kepeloporan KH Wahid Hasyim, Piagam Jakarta diganti dengan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana penambahan kata Esa menggarisbawahi prinsip tauhid yang tidak terdapat pada agama lain. Dengan demikian, Indonesia tidak menjadi negara Islam, tetapi negara monoteis (Feillard, 1999: 39). Bab tentang agama ini kemudian dimuat dan dijabarkan dalam Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi: (1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kemelut ideologi yang menyertai awal lahirnya negara baru ini berakhir dengan suatu kompromi yang khas. Indonesia secara konstitusional bukan negara Islam, tetapi juga bukan negara sekuler yang memandang agama semata-mata sebagai masalah pribadi yang sama sekali terlepas dari negara (Haidar, 1994: 254). Penetapan Indonesia sebagai bukan negara agama dan bukan negara sekuler merupakan eksperimen yang tidak ada duanya dalam sejarah, dan oleh sebab itu tidak mengherankan bahwa upaya untuk menjalankannya tidaklah mudah (Simatupang, 1991: 236-37).

Konvergensi antara Islam dan nasionalisme dalam NKRI merupakan capaian dari upaya sintesis yang tidak mudah (*uneasy synthesis*) (Binder, 1979). Pancasila dan NKRI adalah jalan tengah simbiotik di antara dua arus pandangan, yaitu pandangan yang ingin memisahkan agama dan negara (sekularistik) dan pandangan yang ingin menyatukan keduanya dengan jargon *al-Islâm al-dîn wa al-dawlah*. Para *founding fathers* telah meletakkan *legacy* bagi tercapainya konsensus nasional, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) melalui tokoh-tokohnya. NU menyumbang basis bagi tercapainya konsensus nasional pada 1945 dan diperkuat pada Mukhtamar Situbondo 1984 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk final upaya seluruh *nation*, termasuk umat Islam, untuk mendirikan negara di kawasan Nusantara. NKRI merupakan hasil *mu'âhadah wathaniyyah* (konsensus nasional) yang harus dipelihara dan dipertahankan sampai kapan pun.

Sintesis Islam-nasionalisme di Indonesia dipermudah oleh karakteristik Islam Indonesia yang toleran dan pluralistik. Islam memang agama terbesar yang paling banyak dipeluk oleh bangsa Indonesia, tetapi ekspresi Islam Indonesia sangat beragam. Islam disebarkan di Indonesia bukan melalui perang dan kampanye militer, tetapi melalui proses pembauran dengan agama dan budaya yang sudah terlebih dulu ada di Nusantara. Islamisasi di Indonesia tidak membabat secara radikal pengaruh-pengaruh kepercayaan animisme, Hinduisme, dan Budhisme yang telah berakar kuat di Jawa, Bali, dan pulau-pulau lainnya. Islam Indonesia, terutama yang disebarkan oleh Wali Songo, sangat toleran terhadap kecenderungan-kecenderungan sinkretik sembari secara perlahan menyusupkan pesan Islam ke dalam praktek kepercayaan kuno masyarakat. Islamisasi yang dilakukan Wali Songo adalah substansialisasi Islam, yakni tidak memerangi bentuk tetapi menyusupkan isi. Sintesis kreatif ini secara baik seperti ditunjukkan oleh model dakwah Sunan Kalijaga, yang menjelma dalam istilah-istilah kejawen tetapi sebenarnya berisi Islam seperti Sekaten, Dalang, Jimat Kalimosodo, dan lain sebagainya (Syeirazi, 2013: 143).

Nasionalisme juga bisa diterima karena ia hadir di bumi ini sebagai kekuatan integratif yang menyatukan elemen-elemen bangsa dalam meraih kemerdekaan nasional. Tidak heran jika pada periode kemerdekaan beredar luas slogan seperti *hubbul wathan minal îman* (cinta bangsa bagian dari iman). Kata-kata bertuah ini, menurut Syihab (1971), dipopulerkan oleh Hadlaratus Syeikh KH. Hasyim Asy'ari, sehingga beliau dijuluki sebagai "*wâdlî'u labinati istiqlâli Andunisi*" (peletak dasar kemerdekaan Indonesia). Ini berbeda dengan pengalaman nasionalisme di Timur Tengah yang identik dengan hancurnya Imperium Othmania dan bubarnya Khilâfah Islam pada tahun 1924 serta disintegrasi bangsa Arab ke dalam negara-negara kecil seperti Mesir, Arab Saudi, Syiria, dan Turki yang saling bertikai dan dilanda pergolakan yang tak putus-putus. Islam divergen dengan nasionalisme, padahal Islam dan ajarannya tidak bisa dilaksanakan secara sempurna tanpa tanah air. Mendirikan masjid, membangun madrasah dan pesantren, membuat rumah sakit dan perguruan tinggi, dan akhirnya mewujudkan *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr* tidak dapat dilakukan di atas awan, tetapi harus berpijak di tanah air. Karena itu, mencintai tanah air bagian dari iman.



hubbul wathan minal îman

(cinta bangsa bagian dari iman)

Hadlaratus Syeikh KH. Hasyim Asy'ari,
"*wâdlî'u labinati istiqlâli Andunisi*" (peletak
dasar kemerdekaan Indonesia).

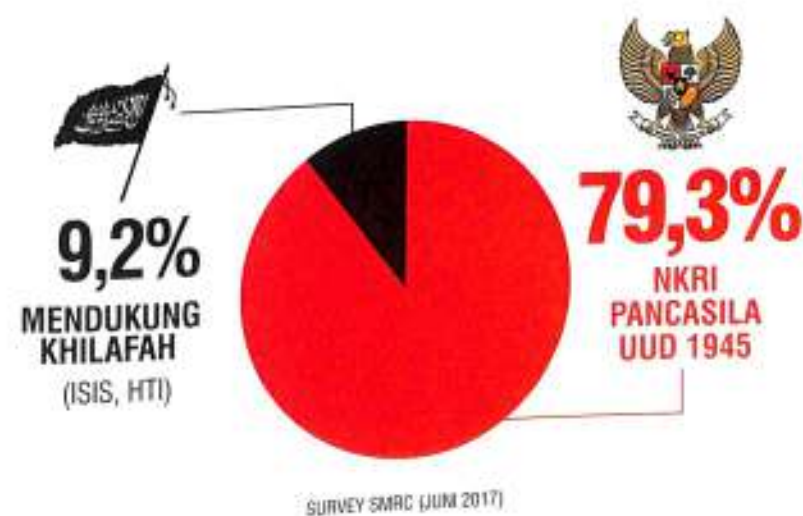
Rasulullah SAW telah memberikan contoh ketika mendirikan Negara Madinah. Beliau memimpin sebuah masyarakat multietnis dan multiagama dengan landasan konstitusi yang dikenal dengan Piagam Madinah (*Shahîfah Madînah*). Warga negara dari berbagai suku dan agama dinyatakan sebagai *ummatan* (warga negara) yang berkedudukan sederajat. Dalam Piagam Madinah disebutkan (Hisyâm, 2001: 232-234): "Kaum mu'min baik dari Quraisy maupun Yatsrib adalah umat yang satu (*ummatan wâhidah*).” Yahudi Banî Auf, Banî Najjâr, Bani Hârits, Bani Saidah, dan seterusnya adalah satu umat bersama kaum mu'minin (*ummatun ma'al mu'minin*). Bagi orang Yahudi agamanya, bagi orang Islam agamanya. Di antara mereka wajib bahu membahu dan saling membela dari serangan luar (*inna bainahum an-nashru alâ man hâraba ahla hâdzihis shahîfah*), dilindung jiwanya kecuali yang zalim dan bersalah (*illâ man dzalama wa atsima*).” Dalam Piagam Madinah, warga negara yang multiagama itu dinyatakan sebagai setara. Tidak ada idiom mu'min atau kafir dalam konteks bernegara dan bermasyarakat. Tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang dzalim.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin yang mulia,

Jika di tempat-tempat lain nasionalisme gagal menjadi tandem bagi perjuangan Islam, Islam di Indonesia terbukti mampu bersimbiosis dengan nasionalisme. Bangkitnya gairah beragama yang meluas, yang ditunjukkan oleh panjangnya antrian haji, meningkatnya jumlah rumah ibadah, maraknya kegiatan pengajian di kantor-kantor, semakin banyaknya orang untuk tidak sungkan-sungkan lagi menyatakan identitas keagamaannya, serta munculnya kelompok-kelompok keagamaan baru di luar arus besar NU dan Muhammadiyah memang menimbulkan kompetisi dan ketegangan keagamaan, namun tidak mengeliminasi karakter dasar Islam Indonesia yang pluralistik dan toleran. Berbagai proposal tentang formalisasi Islam, yang menjelma dalam sejumlah regulasi bernuansa Islam, dari level Undang-Undang hingga apa yang dikenal sebagai Perda-Perda Syariah yang berjumlah 443 Perda, tidak menghapuskan

kemajemukan dan tenggang rasa yang menjadi ciri utama bangsa Indonesia. Kemunculan Perda-Perda Syariah itu, sebagaimana dicatat Buehler (2016: 27), tidak menunjukkan pergeseran karakter ideologis bangsa Indonesia yang toleran, tetapi lahir dari dorongan kalkulasi manfaat politik (*political expediency*) untuk tujuan elektoral.

Kendatipun terdapat seruan-seruan dari sebagian kecil kelompok Islam untuk mengganti negara nasional dengan negara Islam/*Khilâfah Islâmiyah*, namun seruan ini tidak berpengaruh luas di Indonesia. Mayoritas kekuatan Islam Indonesia tidak bercita-cita merobohkan negara nasional dan menggantinya dengan *Khilafah*, melainkan berusaha menempatkan agenda-agenda Islam dalam kerangka negara nasional. Survei yang dirilis *Saiful Mujani Research and Consulting* (SMRC) pada Juni 2017 menunjukkan, 79,3 persen responden menganggap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah terbaik bagi rakyat Indonesia. Hanya 9,2 persen yang mendukung *Khilafah* seperti perjuangan ISIS dan HTI (*Kompas.com*, 4/6/2017). Harus diakui terdapat tantangan baru dalam kehidupan sosial keagamaan kita berupa ujaran kebencian (*hate speech*) yang melibatkan sentimen keagamaan, namun pendidikan melek digital (*digital literacy*) dan penegakan hukum dapat mencegah fenomena



ini menjadi bara api yang mengancam bangunan NKRI. Ekspresi kebangkitan Islam di Indonesia secara umum tidak menjelma sebagai fundamentalisme Islam dan menguatnya primordialisme, melainkan Islam yang oleh Nakamura (1993: 24-5) disebut sebagai "Islam yang modern dan cantik".

Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin yang mulia,

Kelangsungan dan kemajuan NKRI akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menghadapi tiga tantangan sebagaimana diuraikan di atas yaitu etnonasionalisme dan masalah kebhinnekaan, fundamentalisme agama yang berniat mendirikan Khilafah transnasional, dan fundamentalisme pasar yang melahirkan frustrasi dan ketimpangan. NKRI akan eksis dan berjaya kalau sanggup mengelola kebhinnekaan dan mampu mentransformasikan nasionalisme etnis (*ethnic nationalism*) menuju nasionalisme kewargaan (*civic nationalism*). Politik berbasis sentimen primordial (*primordial sentiments*) dirombak menjadi politik sipil (*civil politics*) berkeadaban. Masyarakat majemuk (*plural society*) yang terfragmentasi ditransformasikan menjadi masyarakat multikultur (*multicultural society*) yang mengakui dan menghargai kehadiran beragam kelompok dalam kesatuan masyarakat luas, menerima perbedaan sosio-kultural, serta memberdayakan dan mendorong kontribusi mereka melalui penerapan budaya inklusif dalam masyarakat luas (Rosado, 1996: 2).

Masyarakat multikultur akan stabil dan kohesif dengan modal identitas nasional sebagai semen perekat di antara berbagai komunitas yang beragam. Multikulturalisme juga bertahan jika kekuasaan didasarkan pada kesepakatan, hak-hak konstitusional diterima secara kolektif, negara adil dan tidak memihak, kebudayaan bersifat multikultur, pendidikan mempromosikan multikulturalisme, serta identitas nasional bersifat plural dan inklusif (Parekh, 2000: 267-309). Multikulturalisme merupakan prasyarat struktural-konsensual, meskipun bukan satu-satunya,



NKRI BERJAYA ←



untuk mencapai apa yang oleh Nasikun (1988: 69) sebut sebagai *cross-cutting affiliation* dan *cross cutting loyalties*, yaitu situasi di mana integrasi masyarakat terjadi dan terjaga karena suatu anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari kesatuan sosial lain dan terciptanya loyalitas ganda di antara berbagai kesatuan sosial tersebut. Afiliasi silang dan loyalitas ganda hanya akan terjadi kalau masyarakat mengakui, menghargai, dan mengakomodasi berbagai ekspresi budaya yang beragam. Di titik ini pendidikan memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kemajemukan dan multikulturalisme (Raihani, 2014).

Tugas negara adalah menjamin politik pengakuan (*the politics of recognition*) terhadap keberagaman masyarakat dan pengakuan terhadap kelompok minoritas (Kymlicka, 1995). Ketika menjadi Presiden, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjalankan politik pengakuan terhadap etnis Tionghoa melalui Keppres No. 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Keppres ini menegaskan penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian tidak terpisahkan dari HAM dan membuka

kembali pengakuan terhadap ekspresi budaya Tionghoa seperti perayaan Imlek, Capgomeh, Barongsai, penggunaan bahasa Mandarin dan penggunaan nama asli Tionghoa, serta pengakuan negara terhadap agama Konghucu. Selain terhadap etnis Tionghoa, Gus Dur juga menjalankan politik pengakuan terhadap masyarakat Papua dengan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memberikan otonomi khusus.

Tugas negara adalah menjamin politik pengakuan (*the politics of recognition*) terhadap keberagaman masyarakat dan pengakuan terhadap kelompok minoritas
(Kymlicka, 1995)



Gus Dur membuka kembali pengakuan terhadap ekspresi budaya Tionghoa seperti perayaan Imlek, Capgomeh, Barongsai, penggunaan bahasa Mandarin dan penggunaan nama asli Tionghoa, serta pengakuan negara terhadap agama Konghucu



Gus Dur juga menjalankan politik pengakuan terhadap masyarakat Papua dengan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memberikan otonomi khusus.

Politik pengakuan telah tertuang dalam sejumlah pasal di dalam UUD 1945 hasil perubahan, antara lain:

Pasal 18 B ayat (2):

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

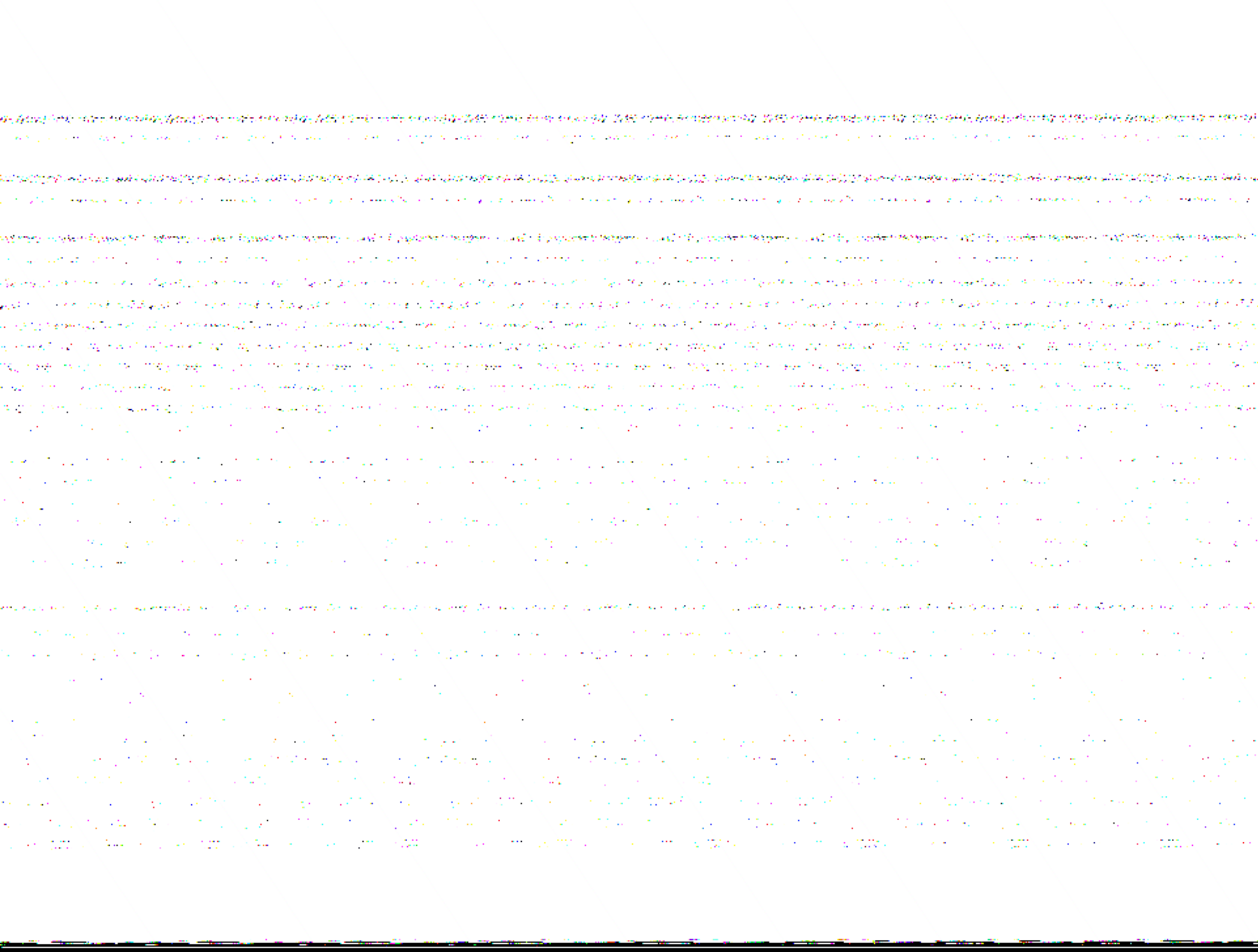
Pasal 28I ayat (3):

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Pasal 32 UUD 1945:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya;
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Nasionalisme Indonesia juga harus diperkuat dengan prasyarat ekonomi dan kesejahteraan sebagai penangkal berseminya ideologi-ideologi militan dan radikal. Di luar faktor paham keagamaan, faktor sosial-ekonomi jelas berperan penting di dalam tumbuhnya radikalisme. Ikhtiar pemerintah meningkatkan kesejahteraan sosial berada dalam satu tarikan nafas dengan upaya mencegah dan mengatasi radikalisme. Deprivasi relatif harus ditekan sedemikian rupa dengan menyediakan lapangan kerja yang luas, mempersempit



Langkah berikutnya adalah mendorong industrialisasi berbasis pertanian. Strategi industrialisasi yang tidak secara langsung dikaitkan dengan pembangunan pertanian dan pedesaan, alih-alih membantu pemerataan, justru akan melanggengkan ketimpangan. Jika sektor pertanian dibenahi, kesenjangan akan berkurang, prasangka rasial dan luka-luka sejarah dapat terobati

3. Optimalisasi fungsi intermediasi perbankan sebagai agen pendorong ekonomi kerakyatan dengan kucuran kredit sektor riil yang lebih banyak.

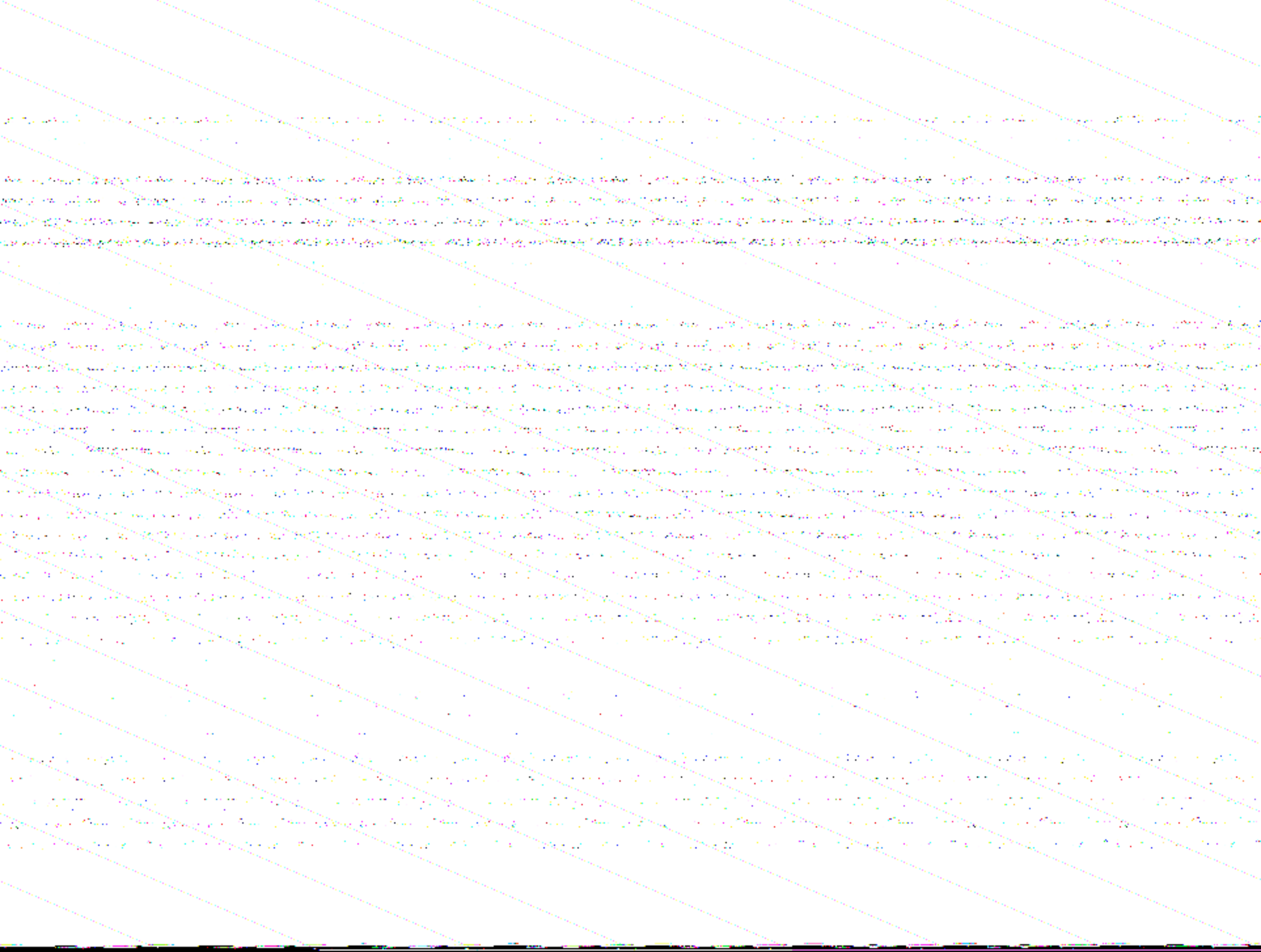
Selama ini sektor perbankan Indonesia belum terlalu agresif mengucurkan kredit sektor riil, dibuktikan dengan rasio Kredit/GDP Indonesia relatif masih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Sektor pertanian, yang yang menampung 44 persen total tenaga kerja Indonesia, misalnya, hanya mendapat alokasi tidak lebih dari 5% dari total kredit Bank. Sebagai pendukung pendanaan, sektor perbankan harus benar-benar menjalankan fungsi kelembagaan intermediasi, bukan hanya mendanai industri-industri besar, tetapi berkomitmen penuh membiayai sektor usaha kecil dan menengah (UMKM).

4. Desa sebagai Sokoguru Pembangunan Nasional.

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Kementerian Desa diakui telah merubah paradigm pembangunan nasional dengan menjadikan desa sebagai subyek dan pilar utama pembangunan. Selama tiga tahun terakhir, keterisolasian, keterbelakangan dan ketertinggalan desa mulai bisa diurai. Namun, sejumlah persoalan harus segera diselesaikan, seperti: ego sektoral, tumpang tindih antar kementerian yang mengurus desa, rendahnya pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa, dan rendahnya sumberdaya manusia di desa semuanya harus diatasi dengan strategi kebijakan yang tepat, terukur,

4 LANGKAH PROYEK SOSIAL EKONOMI INKLUSIF





keluhan dan penderitaan mereka. Konflik antara Islam-Barat hanya dapat diselesaikan dengan menciptakan tata dunia yang lebih adil. Selama masih ada upaya satu pihak untuk mengontrol dan mendominasi pihak lain, permusuhan dan kebencian antardua peradaban besar akan terus berlanjut.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin yang mulia,

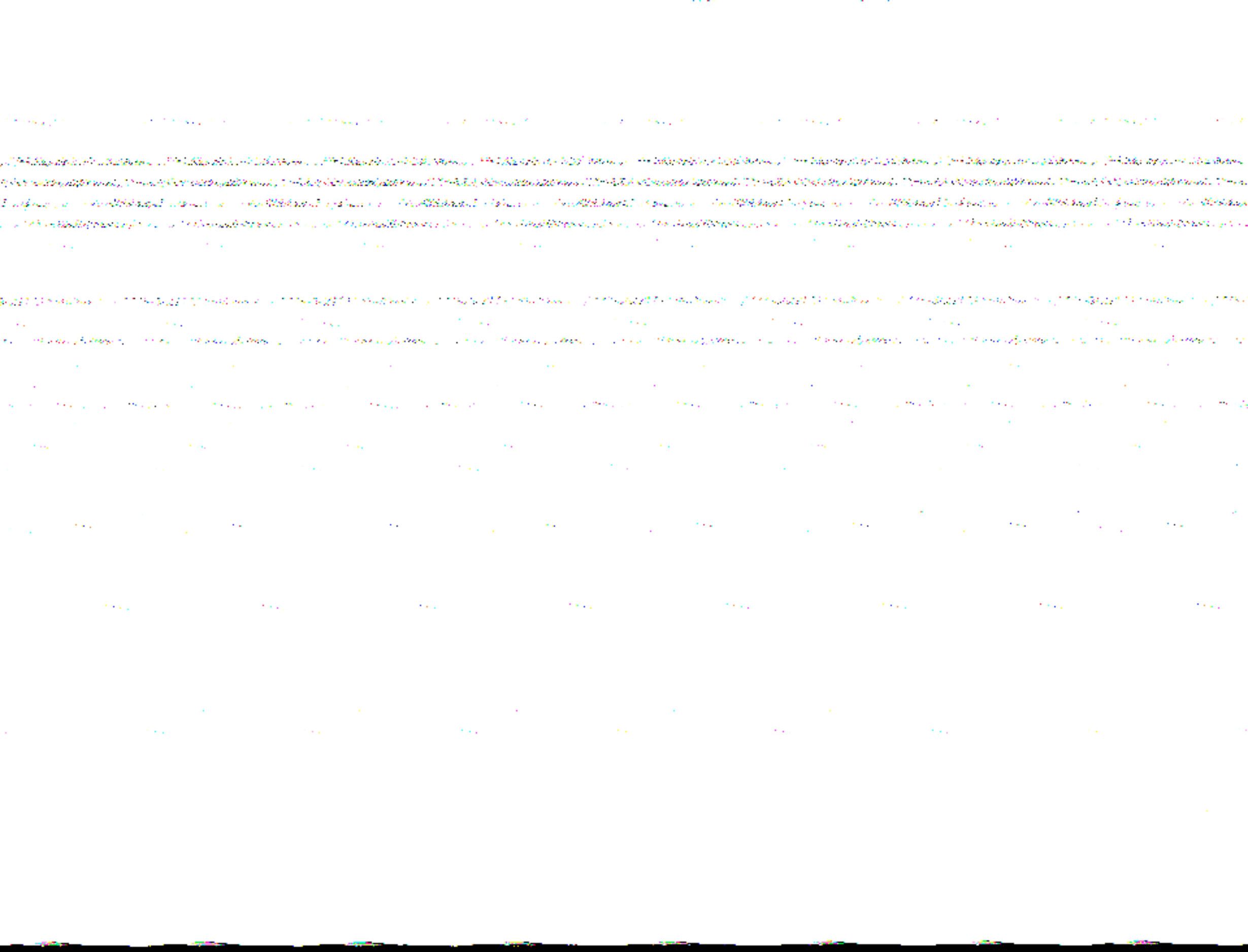
Banyak hal di negeri ini yang dirumuskan dengan cara mengambil jalan tengah, menghindari ekstremitas, mendayung di antara dua karang, dan mengambil keseimbangan di antara dua pendulum. Pancasila Sila Pertama dan UUD 1945 Pasal 29 adalah titik tengah di antara pilihan menjadi negara sekuler atau negara agama. UUD 1945 Pasal 33 adalah jalan tengah di antara kapitalisme dan sosialisme. Sebagian orang menyebutnya *social-market system*. Gotong royong dan peran negara diutamakan, tetapi mekanisme pasar tidak diharamkan. Prinsip jalan tengah ini dalam leksikon NU diterjemahkan dalam sejumlah idiom seperti *tawassuth*, *tawâzun*, *iqtishâd*, *tasâmuḥ* dan *i'tidâl*. Prinsip-prinsip ini relevan dikembangkan sebagai basis politik kebangsaan. *Tawassuth* berarti moderat, tidak ekstrem kanan atau kiri, tidak liberalis juga tidak fundamentalis. NKRI dan Pasal 33 adalah penjelmaan moderatisme dalam politik dan ekonomi. *Tawâzun*, adalah seimbang dan proporsional dalam penerapan kaidah teks (*naqli*), rasio (*aqli*), dan realitas (*waqi'i*). Dengan prinsip ini, dialektika teks dan konteks dijaga agar tidak jumud dan selalu dinamis. *I'tidâl* adalah tegak lurus dan tidak berat sebelah, bersikap adil bahkan terhadap diri dan kelompoknya sendiri. *Tasâmuḥ* adalah toleransi, menenggang orang lain, dan menunjung demokrasi.

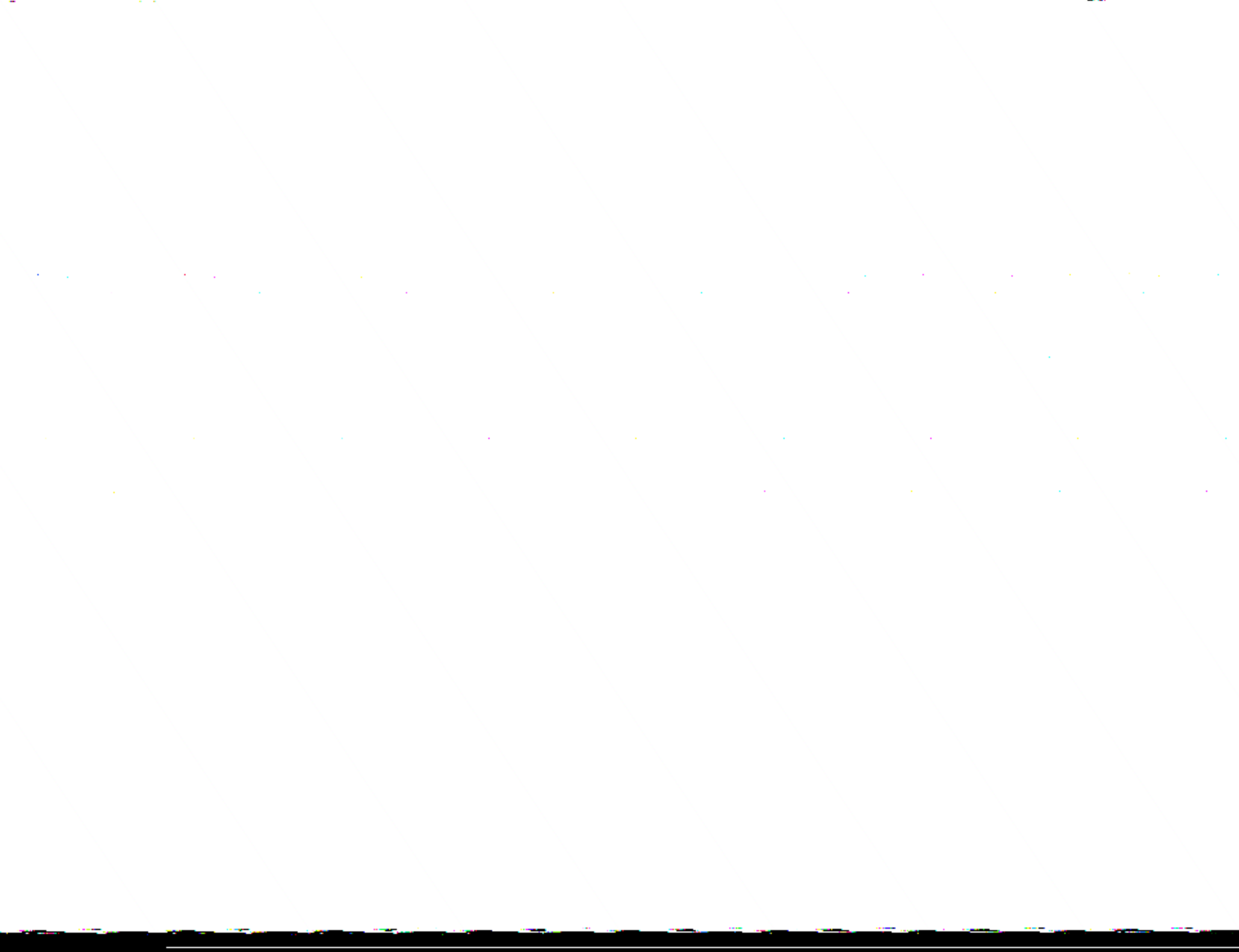
Dirajut dengan prinsip-prinsip dasar dan sejarah serta karakter lokal Islam Indonesia yang toleran dan moderat, Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Dengan stabilitas politik dan pembangunan nasional yang

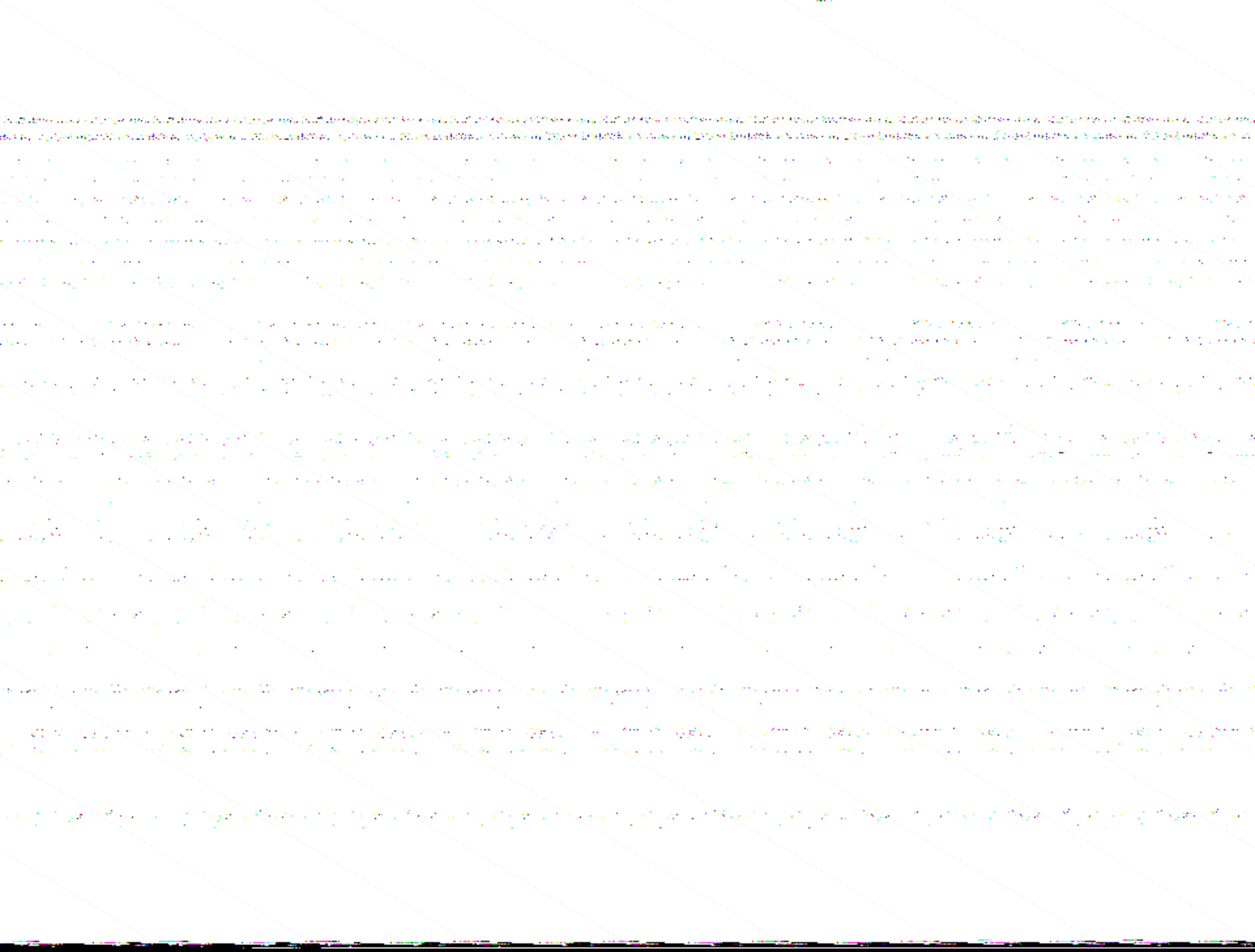
LEKSIKON NU



inklusif, Indonesia dapat beranjak maju dari negara berkembang berpendapatan menengah dengan PDB per kapita US\$3.540 menjadi negara maju dengan PDB per kapita di atas US\$11.750. Pembangunan ekonomi membutuhkan stabilitas politik. Stabilitas politik membutuhkan kemampuan mengelola *fitrah* kebhinnekaan sebagai modal sosial untuk mendorong maju roda pembangunan. *Fitrah* kebhinnekaan akan dapat terpelihara di taman sari kehidupan yang adil dan sejahtera, dengan distribusi kemakmuran yang merata.









A. MUHAIMIN ISKANDAR

- Ketua Umum DPP PKB
- Anggota Komisi I DPR RI

DATA PRIBADI

Nama	: A. Muhaimin Iskandar
Tempat/Tanggal Lahir	: Jombang, 24 September 1966
Usia	: 51 Tahun
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jl. Warung Sila No. -32 RT 02/RW 03 Komplek Masjid Al-Munawaroh, Ciganjur, Jakarta Selatan
Email	: abdulmuhaiminiskandar@gmail.com

KELUARGA

Istri	: Rustini Murtadho
Jumlah Anak	: 3 (Tiga)
Nama Anak	: Mega Safira Rahma Arifa Egalita Azzahra

RIWAYAT PENDIDIKAN

1979 - 1982	Madrasah Tsanawiyah Negeri, Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang
1982	Madrasah Aliyah Negeri I, Yogyakarta
1985	Jurusan Sosiatri FISIPOL UGM, Yogyakarta, S-1
1989	Program Pasca Sarjana Komunikasi UI, S-2

ORGANISASI

1989	Sekretaris Lembaga Kajian Islam dan Sosial Yogyakarta
1990	Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UGM
1989	Sekretaris Lembaga Kajian Islam dan Sosial Yogyakarta
1990 - 1991	Ketua Umum PMII Komisariat UGM
1991 - 1992	Ketua Umum PMII Cabang Yogyakarta
1994 - 1997	Ketua Umum Pengurus Besar PMII
1998 - 2002	Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB
2002 - 2005	Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB
2005 - 2008	Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB
2009 - 2014	Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB
2014 - 2019	Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB

PEKERJAAN

1990	Sekretaris Lembaga Kajian Islam dan Sosial Yogyakarta
1992 - 1994	Kepala Lembaga Pendapat Umum, Jakarta
1994	Kepala Litbang Tabloid Detik
1990 - 1991	Staff Hellen Keller Internasional
2001	Sekretaris Yayasan Semesta Ciganjur
1999	Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI
1999 - 2004	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI

2004 - 2009	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
2009 - 2014	Menakertrans Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II
2014 - 2019	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI

PENGALAMAN

1995

Mewakili Indonesia dalam World Conference on Peace and Religion, Helderhiem Jerman

1997

Mewakili Indonesia dalam International Conference on Interfaith dialog and Peace, Washington DC, USA

1997

Inisiator dan Pendiri Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI)

2010

Memimpin negosiasi dan menghasilkan MOU Indonesia-Malaysia dalam peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan TKI

2010

Ceramah penguatan organisasi buruh dalam memajukan hubungan industrial pada ILO (International Labour Organization) di Geneva Switserland

2012

Pidato dalam International Labour (ILC) ke -101 tentang Proteksi Sosial dan Pelindungan Pekerja di Jenewa, Swiss

2012

Memimpin Delegasi Republik Indonesia sekaligus memberikan Pidato Ketenagakerjaan dalam International Labour Conference (ILC) ke -103 di Palae des Nations , Jenewa, Swiss

2014

Memimpin dan melaksanakan MOU pertama kalinya dalam sejarah hubungan Indonesia - Saudi Arabia

2015

Inisiator Liga Santri Nusantara di Jakarta

2015

Inisiator dan Pendiri Gerakan Nusantara Mengaji, di Jakarta

2016

Memimpin Delegasi PKB ke Moscow membangun kerjasama dengan Partai United Russia (UR) dalam bidang pemberantasan terorisme dan mempromosikan Islam Rahmatan Lil Alamin di Rusia

2017

Pembicara Tunggal Studium Generale dengan tema "Membumikan Pancasila dan Islam Rahmatan Lil Alamin Dalam Sistem dan Lanskap Politik Nasional dan Daerah di Universitas Diponegoro Semarang

2017

Pembicara Kunci dalam Seminar Nasional "Merajut Kebhinekaan Dalam Bingkai Politik Kebangsaan" di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta

2017

Menjadi Pemakalah dan Nara Sumber dari sejak mahasiswa hingga sekarang di pelbagai forum nasional maupun internasional

PENGHARGAAN

2008

Menerima Anugrah BINTANG MAHAPUTRA ADHIPRADANA dari Presiden Republik Indonesia

2017

Menerima Gelar Adat Tertinggi Sayyidul Imam Surya Negara dari Lembaga Penasihat Adat Lubuk Linggau Sumatera Selatan

KARYA TULIS/BUKU

1997

Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran diterbitkan Penerbit PB-PMII, Jakarta

1999

Manajemen Komunikasi Partai Kebangkitan Bangsa diterbitkan Penerbit Pustaka Bumi

2004

Membajak di Ladang Mesin: Simpang Kepentingan Buruh-Negara-Modal di Tengah Arus Kapitalisme Global diterbitkan Penerbit Yayasan Wahyu Sosial, Semarang

2004

Gus Dur yang Saya Kenal: Sebuah Catatan Tentang Transisi Demokrasi Kita diterbitkan Penerbit LkiS, Yogyakarta

2006

Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama diterbitkan Penerbit Klik. R, Yogyakarta

2006

Spiritualitas Sepak Bola: Perspektif Sosial-Politik Piala Dunia 2006 diterbitkan Penerbit Klik. R, Yogyakarta

2009

Momentum Untuk Bangkit: Percikan Pemikiran Ekonomi, Politik dan Keagamaan diterbitkan Penerbit Pustaka Tokoh Bangsa, Yogyakarta

2010

Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur diterbitkan Penerbit LkiS, Yogyakarta

2010

INSPIRING RAMADHAN: Renungan Pencerahan di Bulan Penuh Kemuliaan diterbitkan Penerbit Pustaka Pesantren, Yogyakarta

2014

Pisau Bermata Dua: Menuju Cita TKI Yang Bermatabat dan Bermanfaat diterbitkan Penerbit RM Books, Jakarta

2017

Intoleransi Diskriminasi dan Politik Multikulturalisme diterbitkan Penerbit LkiS, Yogyakarta

2017

Kontekstualisasi Demokrasi di Indonesia diterbitkan Penerbit LkiS, Yogyakarta

ARTIKEL

- Gus Dur dan Internasionalisasi Peran Ulama Pengantar buku Gus Dur Pecinta Ulama Sepanjang Zaman (2005)
- Cattenacio Gus Dur Islam dan NKRI catatan Piala Dunia 2006 Rakyat Merdeka (16 Juni 2006)
- Gus Dur Guru Sumber Inspirasi dan Yang Membesarkan catatan Piala Dunia 2006 Rakyat Merdeka (16 Juni 2006)
- Visi PKB 2010: Refleksi Sewindu PKB Jawa Pos (23 Juli 2006)
- PKB dan Visi Islam Indonesia Jawa Pos (8 November 2006)
- Gus Dur dan Visi Kebangkitan Bangsa Seputar Indonesia (24 Januari 2007)
- Globalisasi dan Proyeksi Tatanan Kehidupan Bangsa di Masa Depan makalah disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Keluarga Besar Marhaenis Jakarta (31 Januari 2007)
- Gus Dur dan Transformasi Kebangkitan Islam Jawa Pos (2 Februari 2007)
- Pluralitas Manifestasi Gerakan Islam Seputar Indonesia (23 Februari 2007)
- In Memoriam Bapak Lingkungan Hidup Jawa Pos (12 Maret 2007)
- Kiai dan Transformasi Masyarakat Seputar Indonesia (28 April 2007)
- Gus Dur dan Siyash Bersendi Syariah Seputar Indonesia (7 Juni 2007)
- Belajar politik Kepada Gus Dur Jawa Pos (7 Juli 2007)
- Adakah Kebangkitan Kembali Indonesia Kompas (9 Juli 2007)
- Gus Dur PKB dan Kebangkitan Indonesia Seputar Indonesia (13 Juli 2007)
- Menajaga Visi Nasional: Soal Khilafah Pancasila dan NKRI Makalah disampaikan pada Seminar Internasional "Khilafah vis a vis NKRI" dalam rangka Temu Alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (14 November 2007)
- Transfigurasi Gerakan Islam Seputar Indonesia (9 Januari 2008)
- Menjaga NU yang Moderat dan Toleran Suara Merdeka (31 Januari 2008)
- NU dan Demokratisasi Bangsa Kedaulatan Rakyat (31 Januari 2008)
- NU Jendela Rumah Indonesia Surya (2 Februari 2008)
- Berguru pada Pendiri NU Seputar Indonesia (3 Februari 2008)
- NU dan Transformasi Bangsa Pikiran Rakyat (9 Februari 2008)

